KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

#2023 #KKP THRIVE

INFINITY

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2024

... KATA PENGANTAR ...

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefenisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

Perencanaan kinerja merupakan penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategic, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Terkait dengan hal tersebut sebagai instrument untuk pengukuran capaian kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, diperlukan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) BRPBAP-PP Tahun 2023. Hasil pengukuran kinerja akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, serta perbaikan perencanaan kinerja di tahun mendatang.

Jakarta, .. Januari 2024

1

Indikator Kinerja :

Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPBAP-PP (Kelompok)

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPBAP-PP (Kelompok)			
2	Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari pembinaan masyarakat diwilayahnya. Setiap kelompok memiliki kode Registrasi sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Kepala BRSDM KP Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Administrasi dan Profil Kelompok Kelautan dan Perikanan. **CONTOH Kode Registrasi Kelompok : 2.1.12.05.0109.0214** 2 : kelompok kelas madya (Menjelaskan Kelas Kelompok) 1 : POKDAKAN (Menjelaskan Jenis Usaha Kelompok) 12 : Provinsi Jawa Barat (Provinsi) 5 : Kabupaten Sumedang (disesuaikan dengan kodefikasi pada masing- masing wilayah) 0109 : bulan dan tahun terbentuk 214 : bulan dan tahun dikukuhkan			
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh yang disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil **yang disahkan oleh Kepala Satminkal Penyuluhan.**			
4	Satuan	:	Kelompok			
5	Tingkat Validitas IK	:	**(X) Output kendali tinggi**	( ) Output kendali rendah	( ) Outcome	
6	Sumber Data	:	Satminkal Penyuluhan KP			
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**	
8	Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung	( ) Lingkup Dipersempit	**(X) Komponen Pembentuk**	( ) Buat Baru
9	Polarisasi	:	**(X)** Maximize	( ) Minimize	( ) Stabilize	
10	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	**(X) Triwulanan**	( ) Semesteran	( ) Tahunan

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
11	Bukti Dukung	:	1. Data Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha KP yang disuluh oleh penyuluh perikanan yang disahkan oleh Kepala Puslatluh KP, sebagaimana matrik; 2. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan

No.	SATMINKAL	Provinsi	Kab/Kota	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	NIK	Jenis Kelamin Ketua Kelompok (L/P)	Kelas Kelompok	NO REGISTRASI KELOMPOK SESUAI PERKA BRSDM NO.4/2019	BIDANG USAHA: (Budidaya ; Penangkapan; Pengolahan/ Pemasaran; Garam, Pengawasan/ Konservasi)	JUMLAH TOTAL PENGURUS DAN ANGGOTA KELOMPOK			Alamat Sekretariat Kelompok	Nama Penyuluh Pendamping	No. Tlp. Penyuluh Pendamping	Status Penyuluh	LINK PROFIL KELOMPOK	LINK PIAGAM PENGUKUHAN/ BA PEMBENTUKAN KELOMPOK/ SK Kadis	LINK PIAGAM PENINGKATAN KELAS KELOMPOK TERAKHIR
											L	P	JUMLAH							
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).	(17).	(18).	(19).	(20).	(21).
1.										Garam										
2.																				
3.																				
Dst.																				

Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang disuluh di BRPBAP-PP (Kelompok)

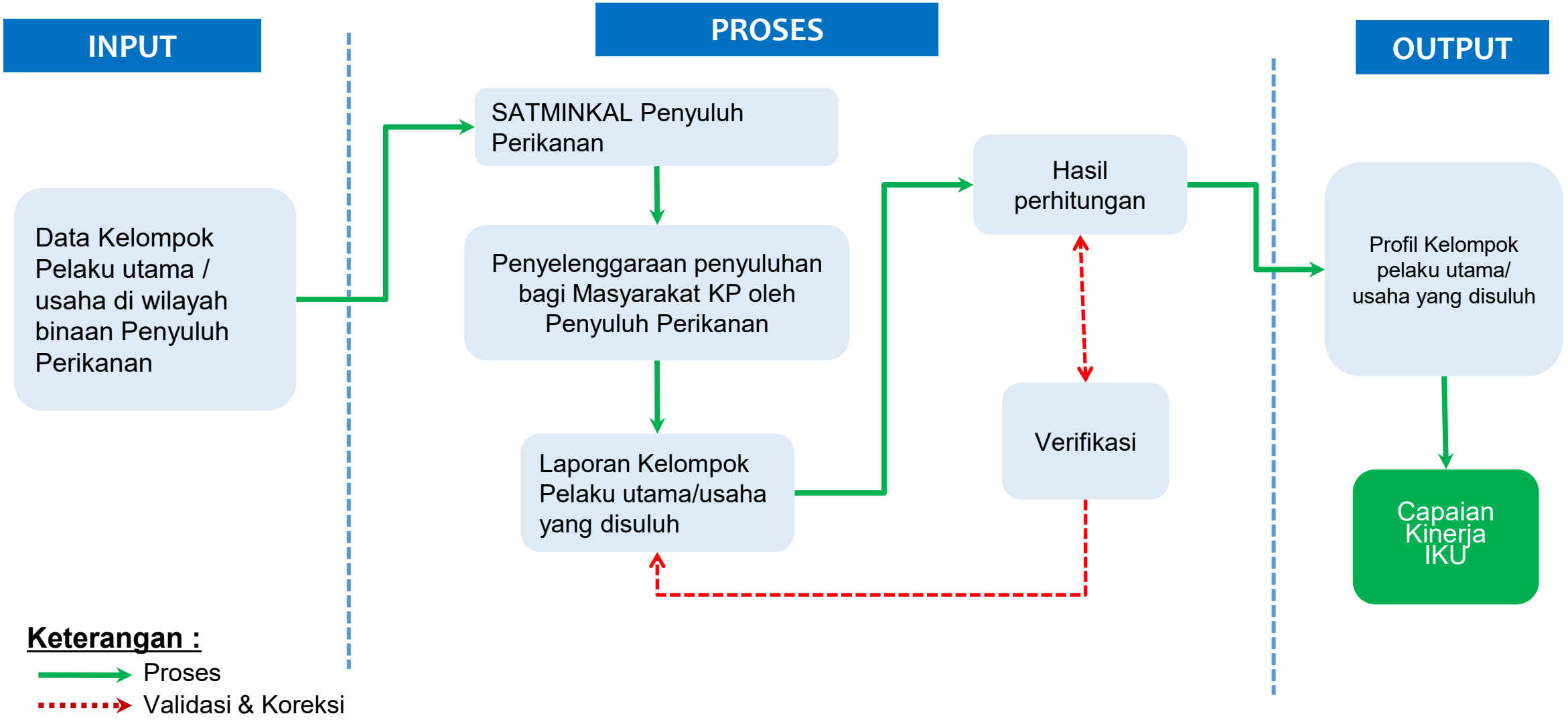

2

Indikator Kinerja :

Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBAP-PP (Kelompok)

√

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBAP-PP (Kelompok)			
2	Definisi	:	Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas nya setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai Kep Men no 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembagan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dan atau pedoman lainnya, dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat, bupati/walikota dan atau Kepala Dinas perikanan setempat sesuai dengan kreteria kelompok yang dikukuhkan, dan /atau Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.			
3	Formula Perhitungan	:	Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelasnya dan memenuhi kreteria peningkatan kelas (kelas pemula ke madya, kelas madya ke utama) dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode triwulan yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan			
4	Satuan	:	Kelompok			
5	Tingkat Validitas IK	:	( ) Output kendali tinggi	( ) Output kendali rendah	**(X) Outcome**	
6	Sumber Data	:	Satminkal Penyuluhan KP			
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**	
8	Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung	( ) Lingkup Dipersempit	**(X) Komponen Pembentuk**	( ) Buat Baru
9	Polarisasi	:	**(X)** Maximize	( ) Minimize	( ) Stabilize	
10	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	**(X) Triwulanan**	( ) Semesteran	( ) Tahunan
11	Bukti Dukung	:	1. Data Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang meningkat, dan data kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang didampingi dan dinilai kelasnya dan dalam proses penetapan, beserta nama penyuluh perikanan Pembina 2. Dokumen penyampaian data dari Eselon II kepada Kepala BPPSDM KP 3. Data yang disajikan (dokumen/matrik) di tandatangani Kepala Satker			

No.	SATMINKAL	Provinsi	Kab/Kota	Nama Kelompok	NIK Ketua Kelompok	Alamat (Minimal Kecamatan dan Desa)	BIDANG USAHA: (Budidaya ; Penangkapan; Pengolahan/Pemasaran; Garam, Pengawasan dan Konservasi)	No Piagam Pengukuhan Kelompok (Ketika Pertama kali dibentuk/ Kenaikan Kelas Sebelumnya)	Tanggal Pengukuhan Pembentukan Kelompok (Ketika Pertama kali dibentuk/ Kenaikan kelas Sebelumnya)	Skor Kelas Kelompok				PIAGAM KENAIKAN KELAS KELOMPOK				Nama Penyuluh Pendampingan	Status Penyuluh	No. Tlp. Penyuluh
										Semula		Menjadi		Nomor Piagam Kenaikan Kelas	Tanggal Piagam	Jabatan Pejabat yang Mengesahkan	LINK PIAGAM			
										Nilai (Skor)	Kelas Kelompok (pemula, madya)	Nilai (Skor)	Kelas Kelompok (madya, utama)							
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).	(17).	(18).	(19).	(20).	(21).
1.								Nomor pengukan Pemula	tanggal Pemula		Pemula		Madya	Nomor Madya	Tanggal madya					
2.								Nomor kelas Madya	tanggal Madya		Madya		Utama	Nomor Utama	Tanggal Utama					
3.																				
Dst.																				

Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BRPBAP-PP (Kelompok)

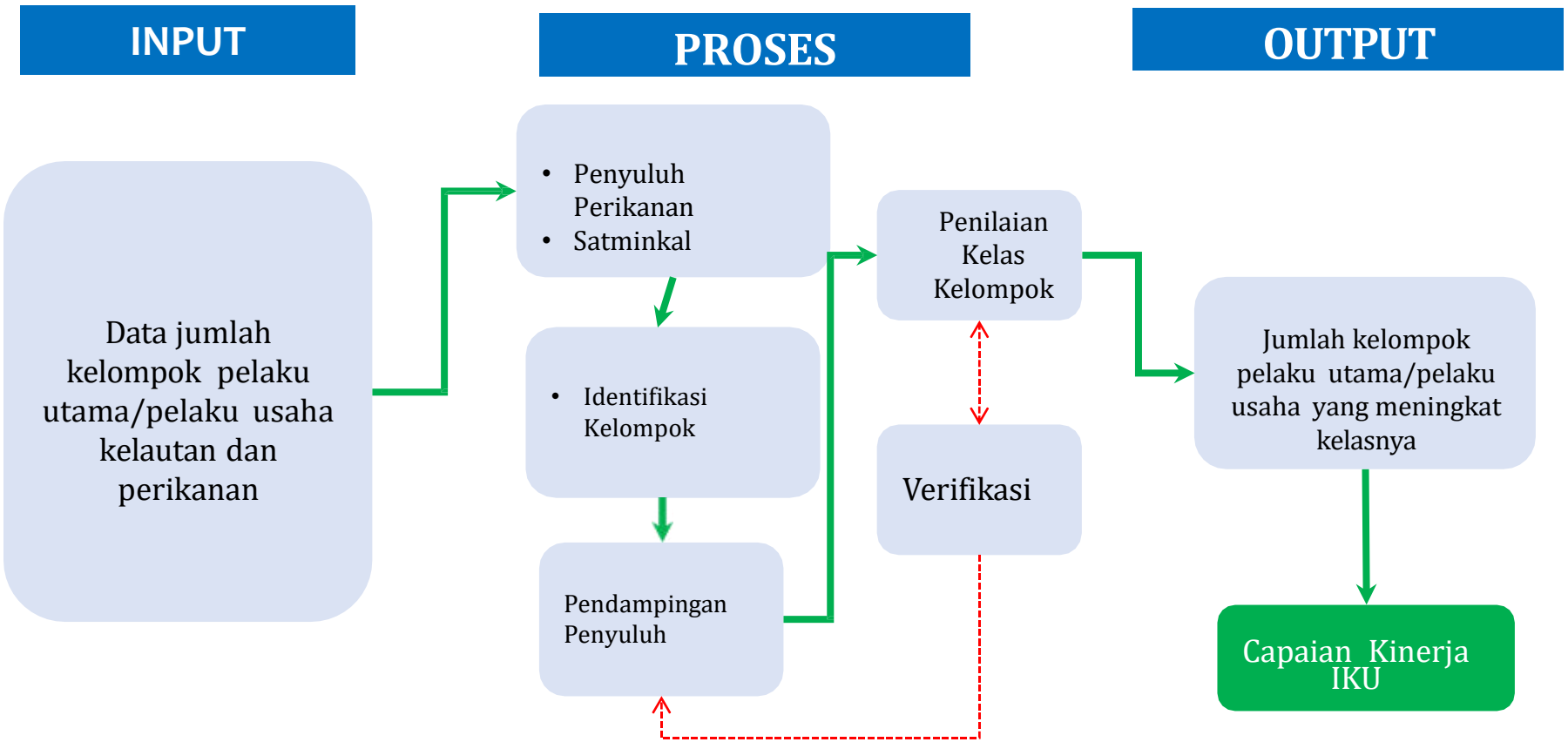

Keterangan :

→ Proses

⇢ Validasi & Koreksi

3

Indikator Kinerja :

Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPBAP-PP (Kelompok)

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPBAP-PP (Kelompok)			
2	Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan, dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, atau pedoman lainnya. Jumlah kelompok yang telah medapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.			
3	Formula Perhitungan	:	Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan			
4	Satuan	:	kelompok			
5	Tingkat Validitas IK	:	( ) Output kendali tinggi	**(X) Output kendali rendah**	( ) Outcome	
6	Sumber Data	:	Satminkal Penyuluhan KP			
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**	
8	Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung	( ) Lingkup Dipersempit	**(X) Komponen Pembentuk**	( ) Buat Baru
9	Polarisasi	:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
10	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	**(X) Triwulanan**	( ) Semesteran	( ) Tahunan
11	Bukti Dukung	:	• Data Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dibentuk (ditambahkan kolom yang berisi Berita Acara Pembentukan/ berisi register sertifikat pengukuhan dan nilainya) beserta nama penyuluh perikanan pembina • Dokumen penyampaian data dari Eselon II kepada Kepala BPPSDM KP • Data yang disajikan (dokumen/matrik) di tandatangani Kepala Satker			

No.	SATMINKAL	Provinsi	Kab/Kota	Nama Kelompok	NIK Ketua Kelompok	Alamat (Minimal Kecamatan dan Desa)	BIDANG USAHA: (Budidaya ; Penangkapan; Pengolahan/Pemasaran; Garam, Pengawasan dan Konservasi)	No Piagam Pengukuhan Kelompok (Ketika Pertama kali dibentuk/ Kenaikan Kelas Sebelumnya)	Tanggal Pengukuhan Pembentukan Kelompok (Ketika Pertama kali dibentuk/ Kenaikan kelas Sebelumnya)	Skor Kelas Kelompok				PIAGAM KENAIKAN KELAS KELOMPOK				Nama Penyuluh Pendamping	Status Penyuluh	No. Tlp. Penyuluh
										Semula		Menjadi								
										Nilai (Skor)	Kelas Kelompok (pemula, madya)	Nilai (Skor)	Kelas Kelompok (madya, utama)	Nomor Piagam Kenaikan Kelas	Tanggal Piagam	Jabatan Pejabat yang Mengesahkan	LINK PIAGAM			
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).	(17).	(18).	(19).	(20).	(21).
1.								Nomor pengukan Pemula	tanggal Pemula		Pemula		Madya	Nomor Madya	Tanggal madya					
2.								Nomor kelas Madya	tanggal Madya		Madya		Utama	Nomor Utama	Tanggal Utama					
Dst.																				

Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang dibentuk di BRPBAP-PP (Kelompok)

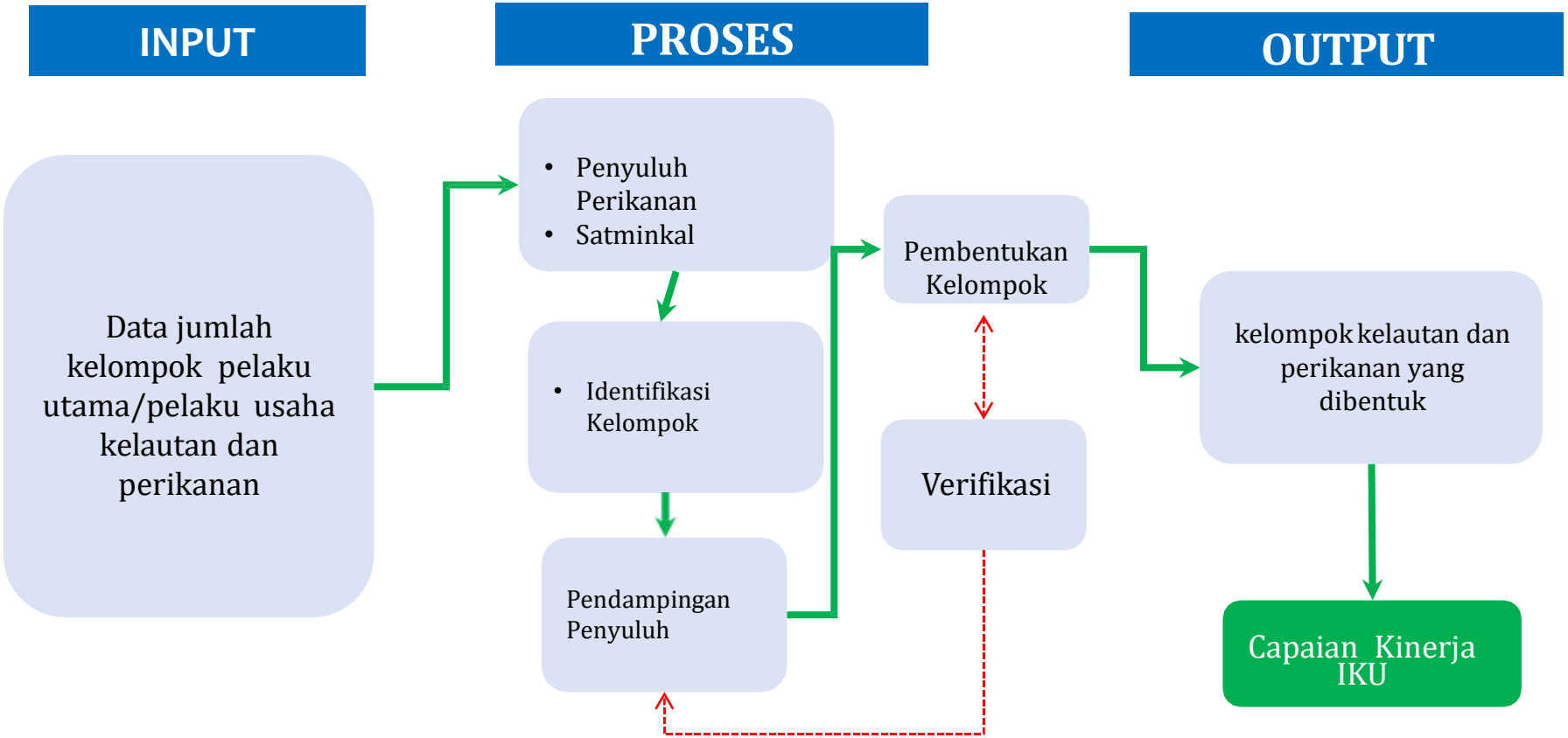

Keterangan :

- Proses
- Validasi & Koreksi

4

Indikator Kinerja :

Tenaga Kerja yang terlibat lingkup BRPBAP-PP (orang)

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Tenaga Kerja yang terlibat lingkup BRPBAP-PP (orang)			
2	Definisi	:	Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan. Tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung di lingkup BPPSDM diantaranya : Penyuluh Perikanan Bantu, Tenaga kerja yang terlibat pada UMKM, Koperasi Sektor KP, Korporasi Sektor KP yang disuluh dan P2MKP, Tenaga Kerja Harian Lepas yang terlibat dalam kegiatan SFV.			
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah tenaga kerja yang terlibat lingkup Puslatluh KP			
4	Satuan	:	orang			
5	Tingkat Validitas IK	:	**(X) Output kendali tinggi**	( ) Output kendali rendah	( ) Outcome	
6	Sumber Data	:	Satminkal Penyuluhan KP, BPPP			
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**	
8	Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung	( ) Lingkup Dipersempit	**(X) Komponen Pembentuk**	( ) Buat Baru
9	Polarisasi	:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
10	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	**(X) Tahunan**
11	Bukti Dukung	:	Data tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung by name by address dan aktivitas masing-masing tenaga kerja yang disahkan pimpinan			

No.	Nama Satker	Nama Tenaga Kerja	NIK	PPB/ P2MKP/ UMKM/ Koperasi/Korporasi Tenaga Harian	No SK / Pengesahan/ SPT	LINK SK / Pengesahan/SPT	BIDANG USAHA: (Budidaya ; Penangkapan; Pengolahan/Pemasaran; Garam, Pengawasan dan Konservasi)	Alamat (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota)	Data Dukung (Foto aktifitas usaha dan Geo Tagging)
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).
1.								Kel. Jatimekar, Kec. Jatiasih Kota Bekasi	
2.									
3.									

Tenaga Kerja yang terlibat lingkup BRPBAP-PP (orang)

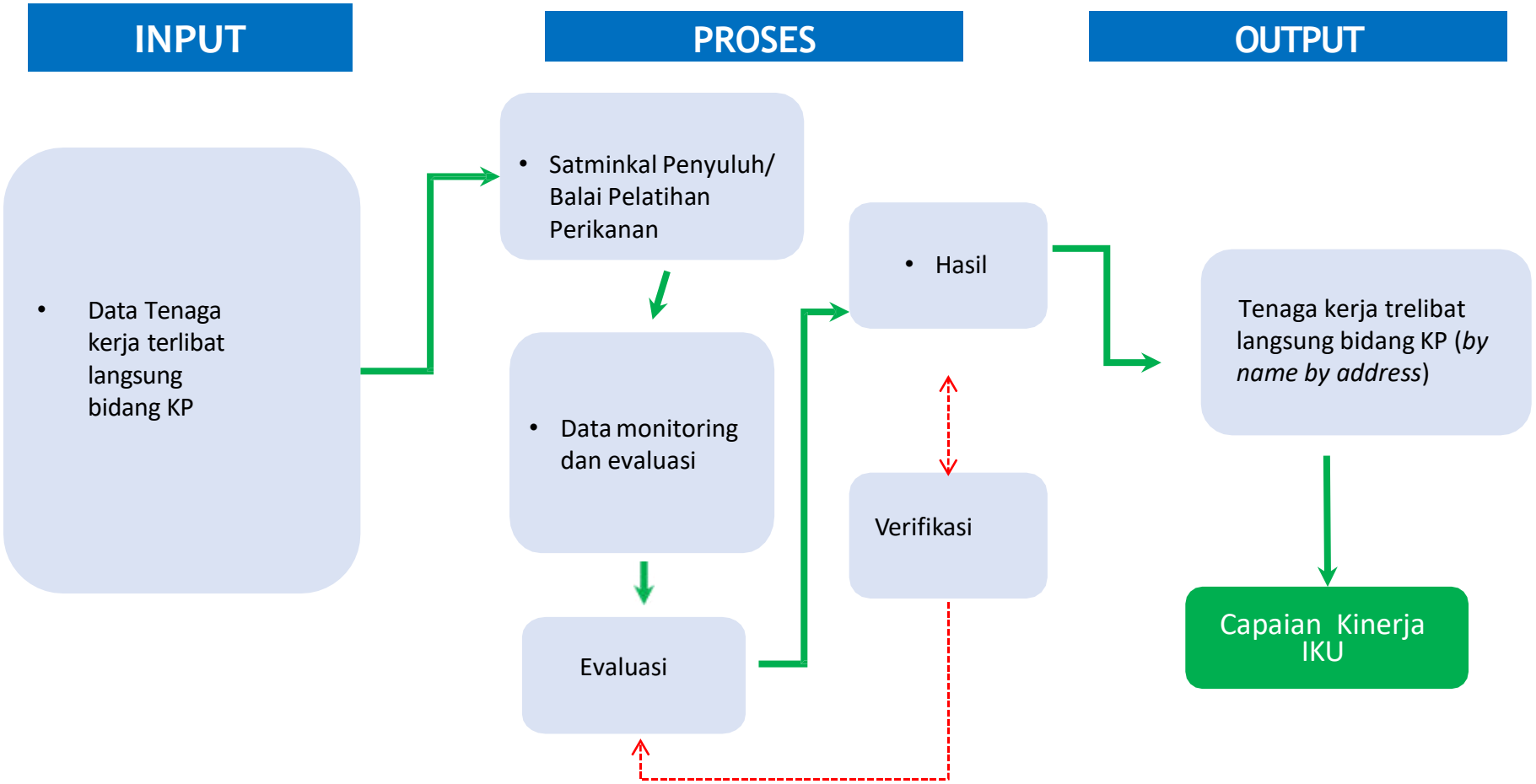

Keterangan :

Proses

Validasi & Koreksi

5

Indikator Kinerja :

Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BRPBAP-PP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP		
1	Nama Indikator	:	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BRPBAP-PP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)		
2	Definisi	:	• Desa/Kawasan mitra merupakan konsep pembangunan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang diwujudkan dalam kegiaan prioritas BPPSDM yaitu Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village (SFV) • Sesuai dengan Keputusan Ka BPPSDM, dengan dikembangkannya Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SFV akan terbentuk desa perikanan unggulan yang produktif yang mampu menerapkan teknlogi dan informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip berkelanjutan		
3	Formula Perhitungan	:	**Indikator capaian Input :** • Penilaian calon lokasi sesuai dengan kriteria Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SMART SFV oleh TAP dan Unit Kerja Pusat • Jumlah desa dikembangkan sesuai dengan kriteria Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SMART SFV yang dikeluarkan melalui SK Ka BPPSDM **Indikator capaian Output :** • Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan Tridarma Perguruan Tinggi pada lokasi Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SMART SFV oleh unit kerja pusat **Indikator Outcome :** • Penilaian hasil pelaksanaan Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SMART SFV yang dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan berdasarkan instrument penilaian • Penghitungan capaian minimal s/d indikator capaian output		
4	Satuan	:	Desa		
5	Tingkat Validitas IK	:	( ) Output kendali tinggi	**(X) Output kendali rendah**	( ) Outcome
6	Sumber Data	:	Satminkal Penyuluhan KP		
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP			
8	Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung	( ) Lingkup Dipersempit	**(X) Komponen Pembentuk**	( ) Buat Baru
9	Polarisasi	:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
10	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	**(X) Tahunan**
11	Bukti Dukung	:	Indikator Capaian Input : • SK Ka BPPSDM terkait penetapan lokasi Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SFV • Laporan hasil penetapan lokasi sesuai dengan krieria Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SFV oleh TAP Indikator Capaian Output : • Laporan pelaksanaan pelatihan dan/atau penyuluhan dan/atau tridharma perguruang tinggi yang dilaksanakan Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SMART SFV oleh UPT dan disampaikan kepada Kepala Pusat nya Laporan Capaian Outcome • Laporan hasil penilaian outcome Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SMART SFV oleh Tim Sekretariat BPPSDM			

Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BRPBAP-PP (Desa Perikanan Cerdas) (desa)

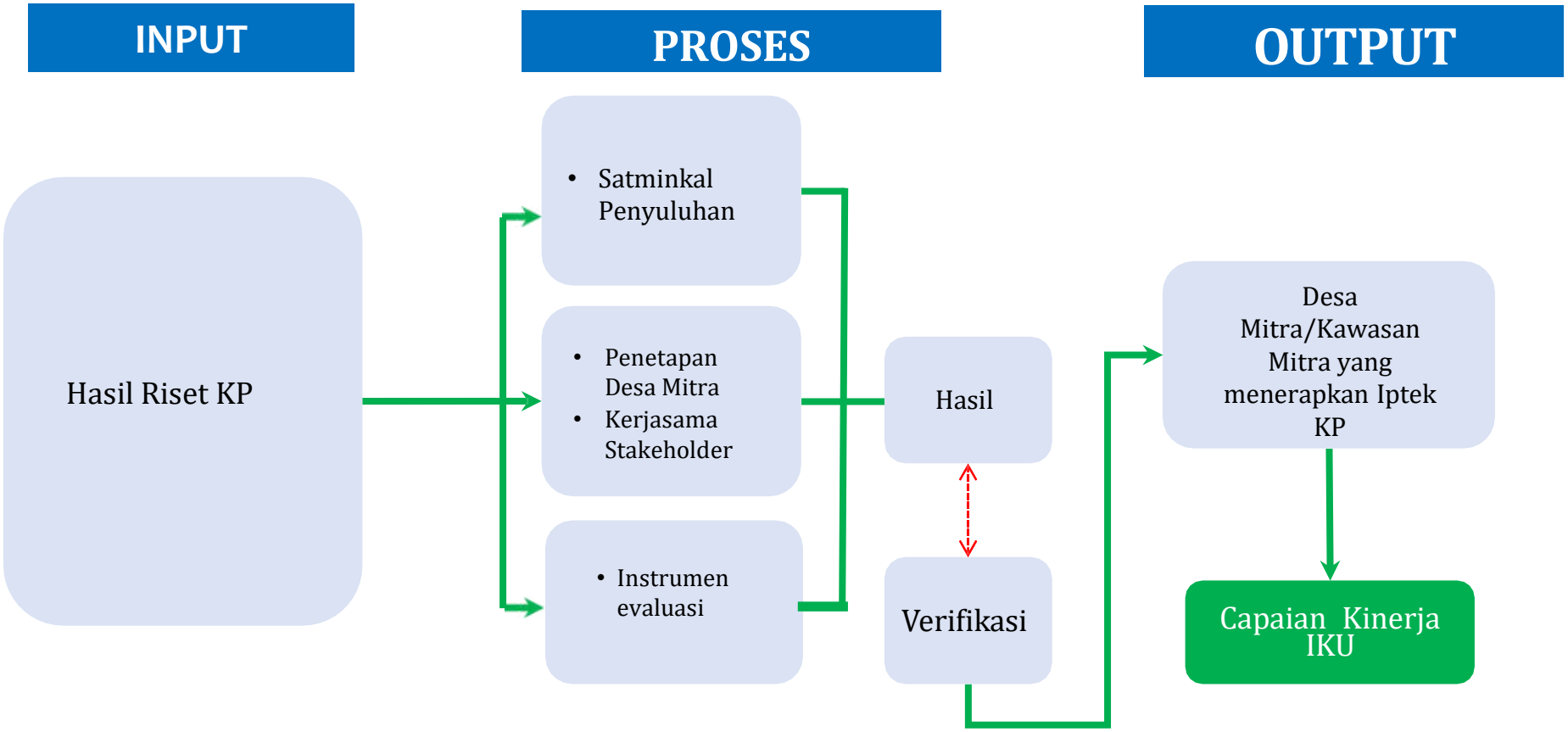

Keterangan :

Proses

Validasi & Koreksi

6

Indikator Kinerja :

Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BRPBAP-PP (Kelompok)

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP			
1	Nama Indikator	:	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BRPBAP-PP (Kelompok)			
2	Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna. Pemilihan lokasi percontohan melalui tahap koordinasi dengan pemerintah setempat dan proposal perontohan telah disetujui oleh Pusat pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pelaksanaa percontohan dan Pedoman SFV.			
3	Formula Perhitungan	:	Hitung jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman percontohan			
4	Satuan	:	Kelompok			
5	Tingkat Validitas IK	:	( ) Output kendali tinggi	**(X) Output kendali rendah**	( ) Outcome	
6	Sumber Data	:	Satminkal Penyuluhan KP			
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**	
8	Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung	( ) Lingkup Dipersempit	**(X) Komponen Pembentuk**	( ) Buat Baru
9	Polarisasi	:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
10	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	**(X) Tahunan**
11	Bukti Dukung	:	1. Rekap data Pelaksanaan Percontohan di Satminkal; 2. Laporan Pelaksanaan Percontohan; 3. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan.			

Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BRPBAP-PP (Kelompok)

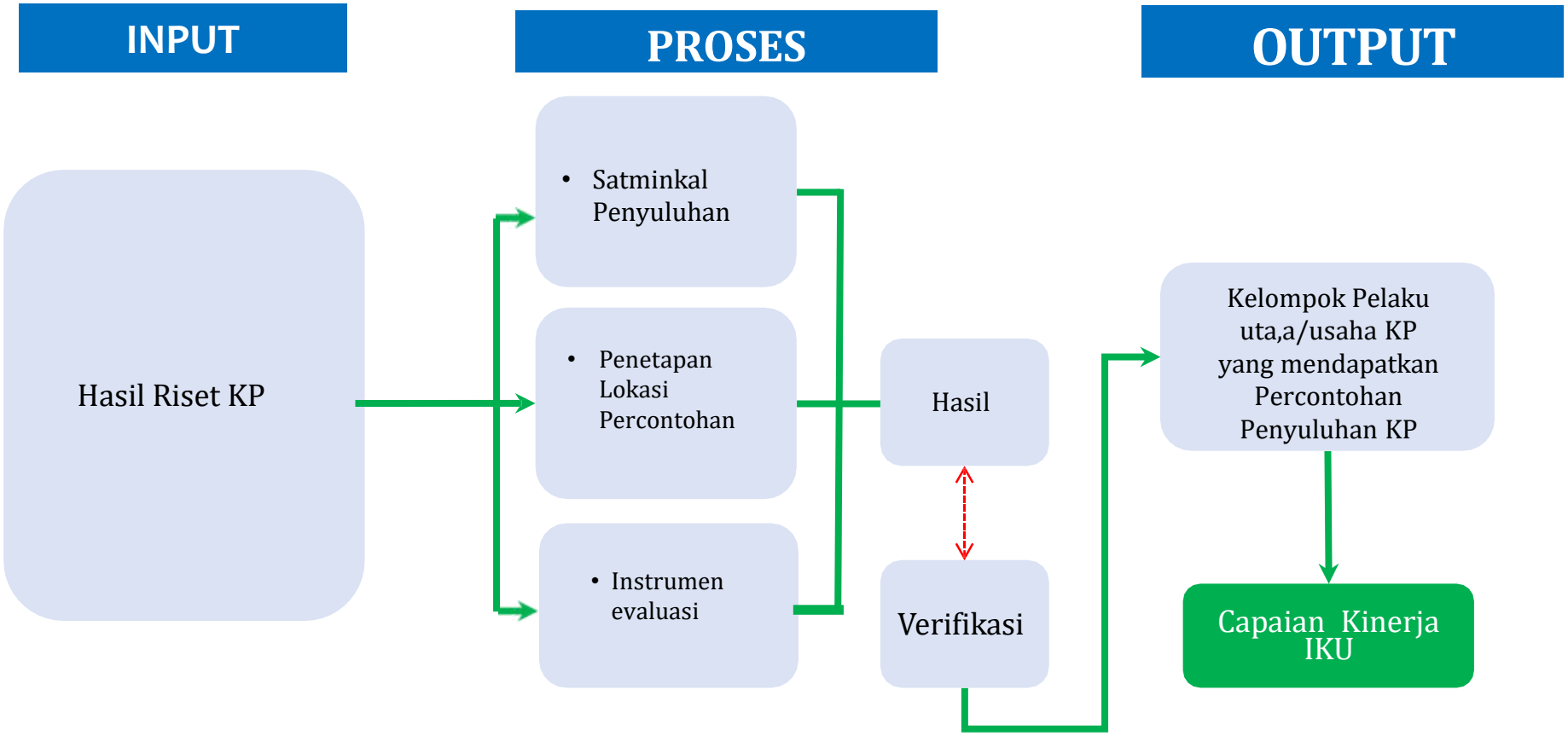

Keterangan :

→ Proses

⇢ Validasi & Koreksi

7

INDIKATOR KINERJA :

Nilai PNBP BRPBAP-PP (Rupiah Miliar)

KODE IK SASARAN			IK UTAMA Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
1	Nama Indikator	:	. áïéø0. " 0 " 20" ! 0 ⌊00 ⌊2ı ēæé÷ - áïæĦ∠			
2	Definisi	:	• Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. • Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. • Dasar hukum : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan d. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah f. PMK 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN g. PMK 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP			
3	Formula Perhitungan	:	$\textit{Nilai PNBP Sektor KP} = \textit{Nilai PNBP SDA} + \textit{Nilai PNBP Lainnya}$			
4	Satuan	:	Rupiah			
5	Tingkat Validitas IK	:	( ) Output kendali tinggi	**(X) Output kendali rendah**	( ) Outcome	
6	Sumber Data	:	UPT lingkup Pusat Riset Perikanan			
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**	
8	Polarisasi	:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	**(X) Triwulanan**	( ) Semesteran	( ) Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN per tanggal 10 bulan berikutnya/surat penyampaian realisasi PNBP dari Kepala Satker ke Pusat			

Nilai PNBP BRPBAP-PP (Rupiah Miliar)

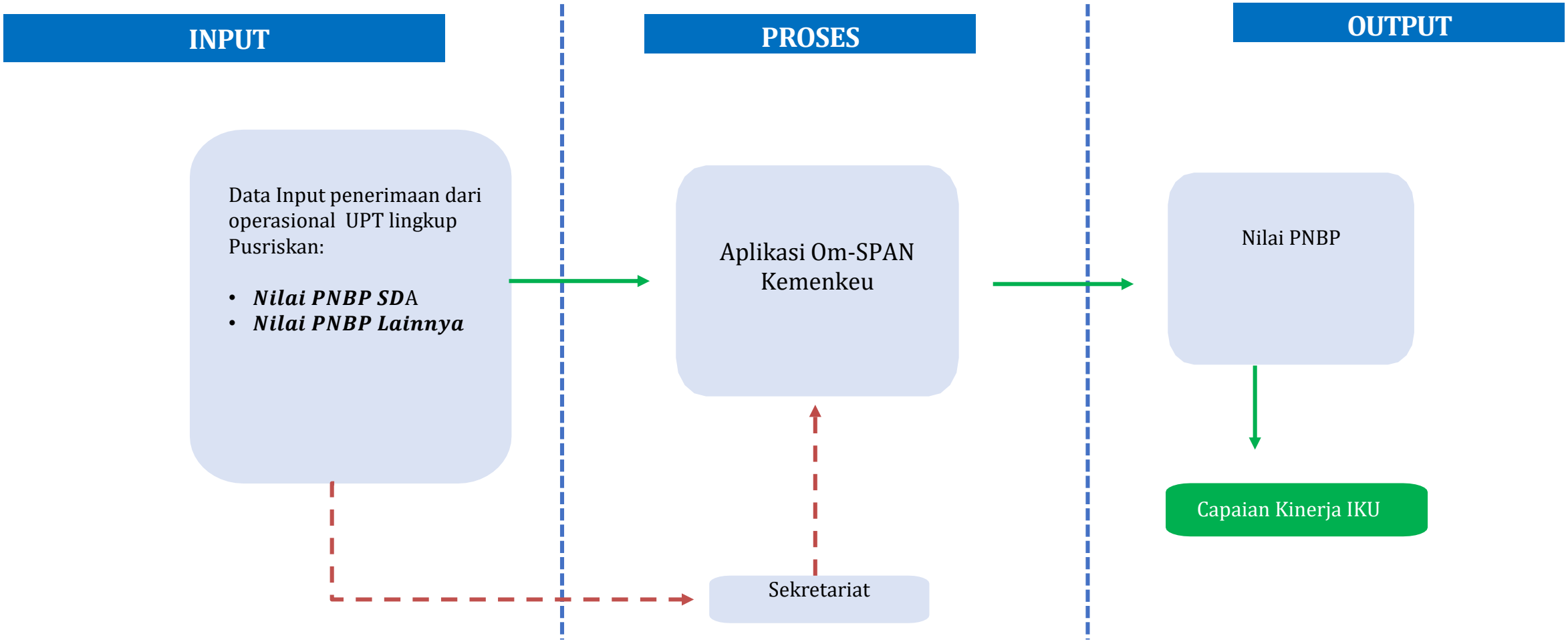

Keterangan :

Proses

Validasi & Koreksi

8

INDIKATOR KINERJA :

Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT BRPBAP-PP (Orang)

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker
1	Nama Indikator	:	4ðāéóé + ðĦé L·éāó 4ðĦúêéī ēéí é 3&6 504 " 20" ! 0 ⌷00 ⌊∠ Ħéāó∠
2	Definisi	:	• Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan. • Tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung di lingkup BPPSDM diantaranya : Tenaga Kerja Harian Lepas yang terlibat dalam kegiatan SFV UPT
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada SFV UPT lingkup Pusat Riset Perikanan
4	Satuan	:	Orang
5	Tingkat Validitas IK	:	**(X) Output kendali tinggi** ( ) kendali rendah ( ) Outcome
6	Sumber Data	:	UPT lingkup Pusat Riset Perikanan
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata **(X) Nilai Posisi Akhir**
8	Polarisasi	:	**(X) Maximize** ( ) Minimize ( ) Stabilize
9	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran **(X) Tahunan**
10	Bukti Dukung	:	Data tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung by name by address dan aktivitas masing-masing tenaga kerja yang disahkan pimpinan

NO	Nama Satker	Nama tenaga Kerja	No SK/Pengesahan/SPT*	Alamat (Kab/Kota)	PPB/PPS/P2MKP /UMKM/tenaga harian lepas*	Bidang usaha : budidaya/ pengolahan/ext*	Keterangan : photo geotagging**
1							
2							
3							
4							

Keterangan
* Pilih salah satu yang sesuai kriteria

Tenaga Kerja yang Terlibat pada SFV UPT BRPBAP-PP (Orang)

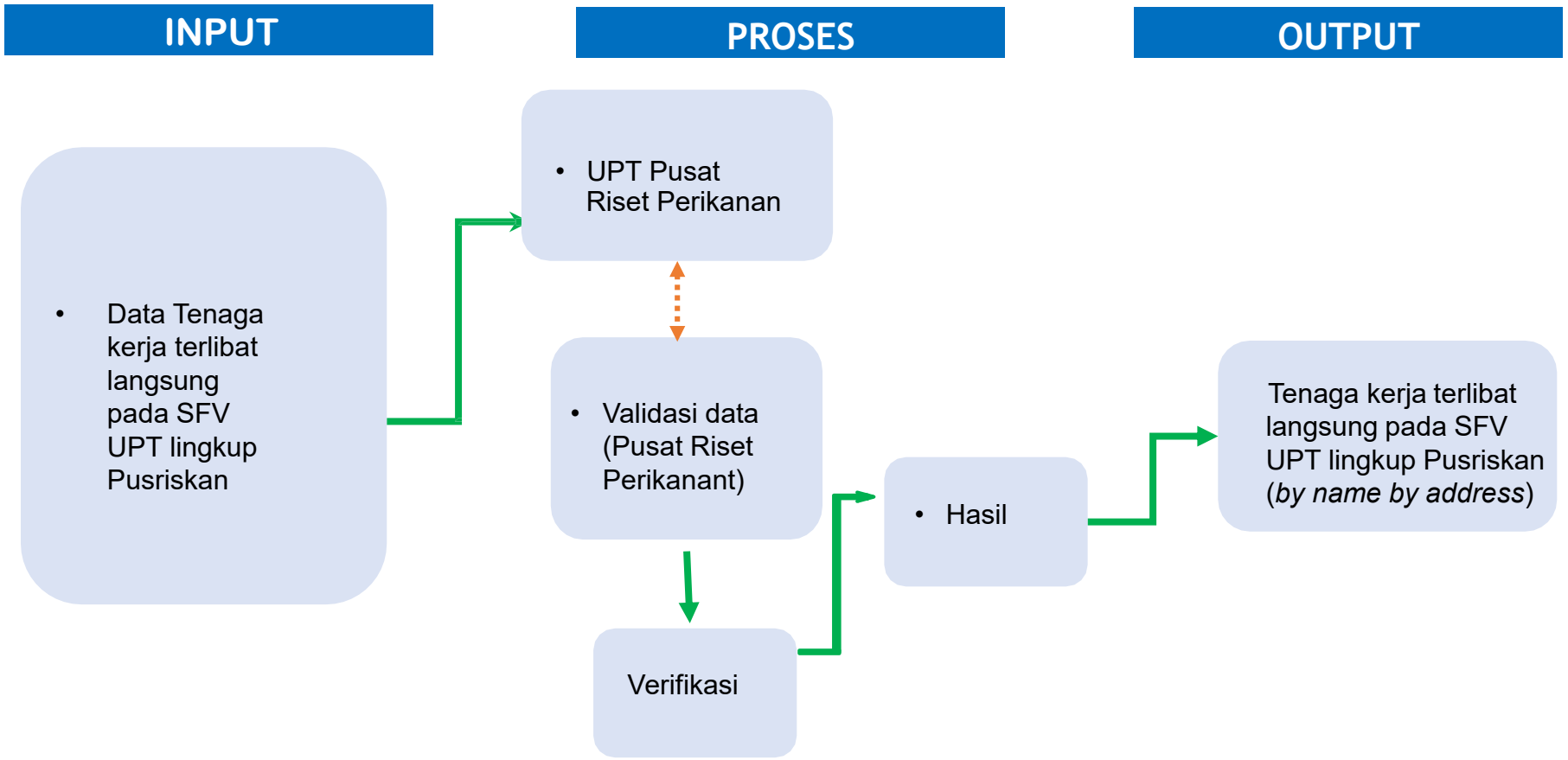

Keterangan :

→ Proses

⇢ Validasi & Koreksi

9

INDIKATOR KINERJA :

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPBAP-PP (%)

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
1	Nama Indikator	:	" éīéħ4ðĦōāóóø. øëø4ðþ ı éā , éēđĦéā (éħøü0ðþ ðĦúħééā " 0+ 12) éīéħ, + " 20" ! 0 100 LźL∠			
2	Definisi	:	Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2023.			
3	Formula Perhitungan	:	$\frac{\textit{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon II Tahun } 2023}{\textit{Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon II Tahun } 2023} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	**(X) Output kendali tinggi**	( ) kendali rendah	( ) Outcome	
6	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan			
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**	
8	Polarisasi	:	( ) Maximize	**(X) Minimize**	( ) Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	**(X) Tahunan**
10	Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian Nilai LHP BPK dari BRSDM KP			

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BRPBAP-PP (%)

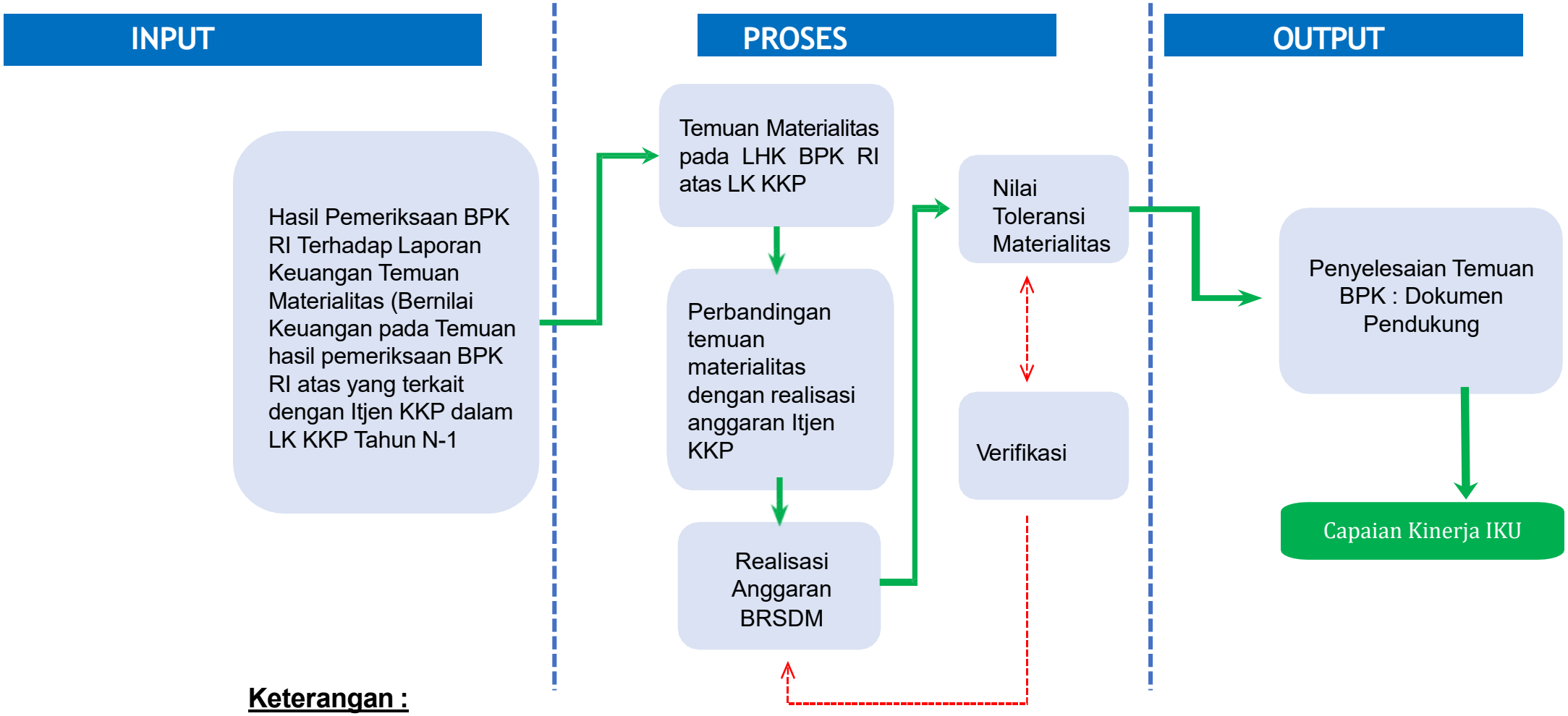

Keterangan :

- Proses
- Validasi & Koreksi

10

INDIKATOR KINERJA :

Indeks Profesionalitas ASN BRPBAP-PP (Indeks)

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker
1	Nama Indikator	:	)āí ðúħ0Ħdòħadāéüāéħ! 3. ✓ 20"! 0 ⌊0 L)āí ðúħ∠
2	Definisi	:	• Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. • Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). • Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023.
3	Formula Perhitungan	:	• Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a)Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin. • Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

• Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir,

Komponen	Jabatan		
	Struktural	Fungsional	Pelaksana
Diklat Kepemimpinan			
Pernah Ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	15		
Tidak Pernah Ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	0		
Diklat Fungsional			
Pernah Ikut Diklat Fungsional		15	
Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional		0	
Diklat Teknis 20 JP			
Terpenuhi 20 JP	15	15	22,5
Tidak Terpenuhi 20 JP	dihitung proporsional	dihitung proporsional	dihitung proporsional
Seminar			
Pernah ikut seminar	10	10	17,5
tidak pernah ikut seminar	0	0	0
Total nilai kompetensi	maksimal 40	maksimal 40	maksimal 40

$$penghitungan\ diklat\ teknis\ 20\ JP = \frac{n}{20\ JP} x\ 15$$

n= jumlah JP diklat yang diikuti

• Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	
3	Formula Perhitungan	:	• Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 1 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut: **Nilai** | **Nama Hukuman Disiplin** | **Nilai Disiplin** 0 | Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin | 5 R | Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan | 3 S | Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang | 2 B | Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat | 1 • Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi: **a. Kualifikasi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN. **b. Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN dengan ketentuan **c. Kinerja** diolah datanya dari aplikasi e-kinerja BKN; **d. Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP/SIASN Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); (c) Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan (d) Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).	• Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesonalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut: ***IPASN pegawai = Nilai Kualifikasi+Nilai Kompetensi+Nilai Kinerja+Nilai Disiplin*** ***IP ASN unit kerja = Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup unit kerja tsb*** ***IP Lev 1 = Rerata Nilai IP ASN dari seluruh unit kerja lingkup Eselon 1*** • Kategori Penilaian IP ASN antara lain **Nilai** | **Kategori** **91 – 100** | Sangat Profesional/sangat tinggi **81 – 90** | Cenderung profesional/tinggi **71 – 80** | Rentan tidak profesional/sedang **61 – 70** | Cenderung tidak profesional/ **≤60** | Sangat tidak profesional/sangat rendah • Sumber Nilai IP ASN 2023 http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023 dan nota dinas Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
4	Satuan	:	Indeks			
5	Tingkat Validitas IK	:	**(X) Output kendali tinggi**	( ) Output kendali rendah	( ) Outcome	
6	Sumber Data	:	BIRO SDMAO *(http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023)*			
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**	
8	Polarisasi	:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	**(X) Semesteran**	( ) Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Surat Hasil pengukuran IP ASN dari BRSDM KP			

Indeks Profesionalitas ASN BRPBAP-PP (Indeks)

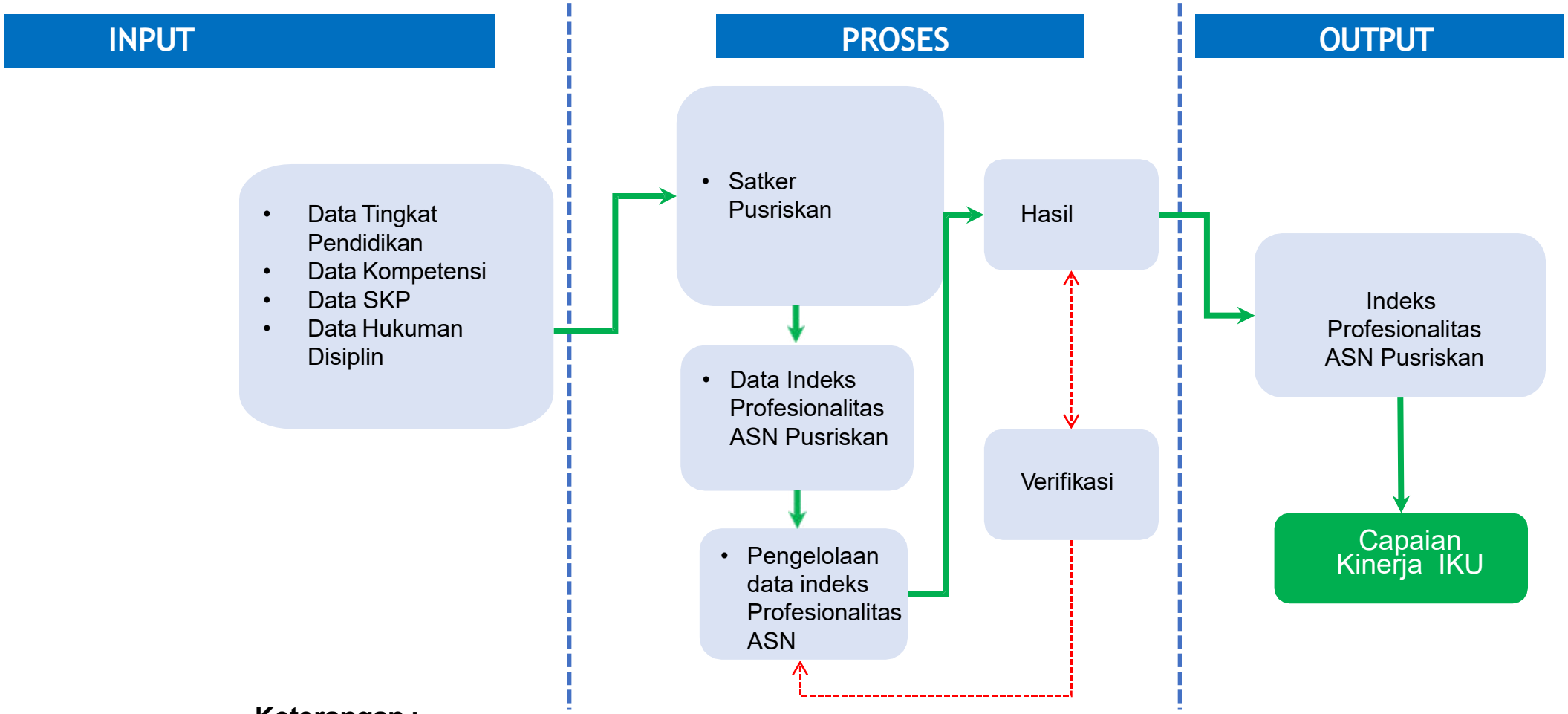

Keterangan :

Proses

Validasi & Koreksi

11

INDIKATOR KINERJA :

Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAP-PP (Nilai)

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker		
1	Nama Indikator	:	0ðāöïéöéā - éāí öïéöéā 3! +)0 " 20" ! 0 100 L öïéöéā		
2	Definisi	:	Nilai PM SAKIP Level II BRSDM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP Unit Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II lingkup BRSDM. Unit Kerja level II lingkup BRSDM terdiri Sekretariat BRSDM, Pusat Rise Kelautan, Pusat Riset Perikanan, Pusat Pendidikan KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, dan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.		
3	Formula Perhitungan	:	Nilai PM SAKIP Level II lingkup BRSDM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BRSDM Kategori nilai PM SAKIP Level II lingkup BRSDM yaitu:		
4	Satuan	:	Nilai		
5	Tingkat Validitas IK	:	**(X) Output kendali tinggi**	(X) Output kendali rendah	( ) Outcome
6	Sumber Data	:	Sekretariat BRSDM		
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup (memadai)
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
8	Polarisasi	:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	**(X) Tahunan**
10	Bukti Dukung	:	(1) Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen, dan/atau; (2) Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim SAKIP BPPSDM			

Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAP-PP (Nilai)

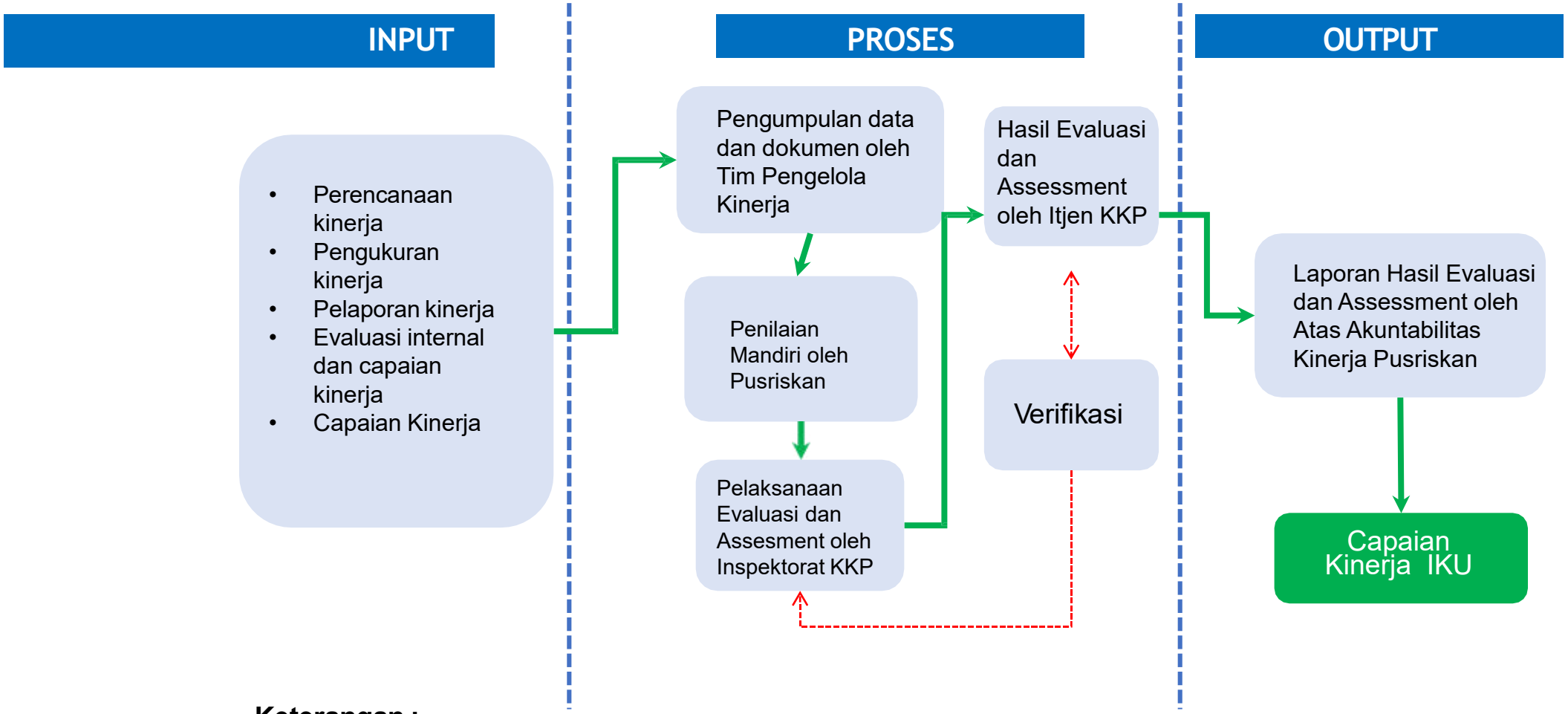

Keterangan :

- Proses
- Validasi & Koreksi

12

INDIKATOR KINERJA :

Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBAP-PP (Nilai)

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker		
1	Nama Indikator	:	. øïéø2 ðúđāħøïéħø+ øāðĦé " 20" ! 0 1 00 L øïéø∠		
2	Definisi	:	(1) Rekonsiliasi kinerja Pusat Riset Perikanan adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Pusat Riset Perikanan (2) Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja Pusat Riset Perikanan, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II Setjen untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik		
3	Formula Perhitungan	:	Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 aspek, sebagai berikut : 1. Aspek Kepatuhan (bobot 25%), yaitu evaluasi kelengkapan dokumen kinerja: (a) Perjanjian Kinerja; (b) Manual Indikator Kinerja; (c) Rincian Target Indikator; (d) Laporan Kinerja; (e) Data Dukung Laporan Kinerja 2. Aspek Kesesuaian (bobot 25%), yaitu evaluasi kesesuaian data antar dokumen Kinerja, dan antara dokumen dengan aplikasi kinerjaku: a) Kesesuaian Target Kinerja (Perjanjian Kinerja – Laporan Kinerja/LCK – Aplikasi kinerjaku) b) Kesesuaian Realisasi Kinerja (Laporan Kinerja/LCK – Aplikasi kinerjaku) c) Kesesuaian pada Sistem Aplikasi (Manual IKU – Rincian Target IKU – Aplikasi kinerjaku) 3. Aspek Ketercapaian (bobot 30%), diukur dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Aplikasi kinerjaku 4. Aspek Ketepatan (bobot 20%), diukur dari ketepatan waktu pelaporan atas LKJ ke atasan, dan Pelaporan dokumen ke aplikasi e-SakipReviu Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja. Nilai Rekonsiliasi Kinerja = (25% x Nilai Aspek Kepatuhan) + (25% x Nilai Aspek Kesesuaian) + (30% x Nilai Aspek Ketercapaian) + (20% x Nilai Aspek Ketepatan)		
4	Satuan	:	Nilai		
5	Tingkat Validitas IK	:	**(X) Output kendali tinggi**	( ) Output kendali rendah	( ) Outcome
6	Sumber Data	:	Perencanaan dan Monev		
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
8	Polarisasi	:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	**(X) Tahunan**
10	Bukti Dukung	:	Surat Penyampaian hasil rekonsiliasi kinerja dari BRSDM KP dan KERTAS KERJA REKONSILIASI KINERJA yang ditandatangi oleh Pembahas dan Kepala Pusriskan			

Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPBAP-PP (Nilai)

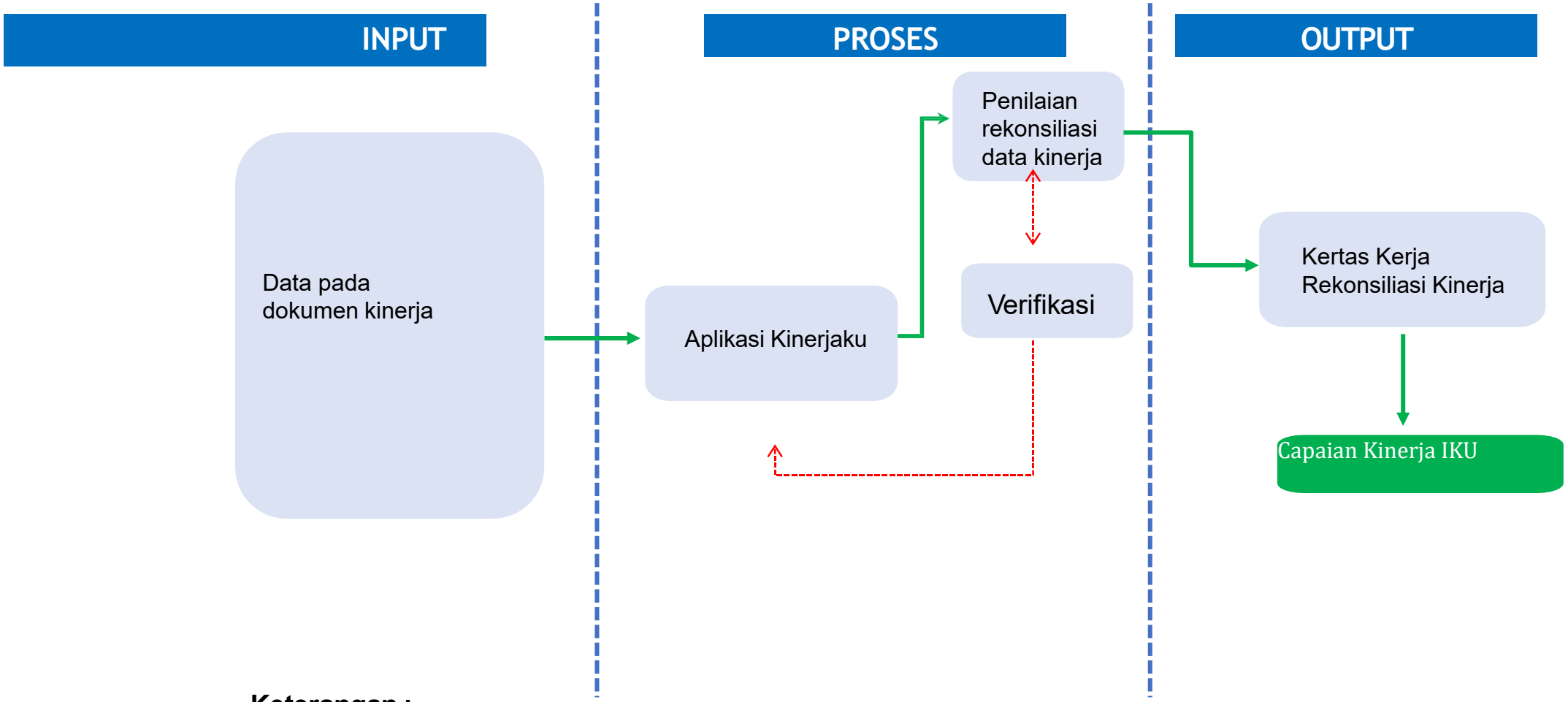

Keterangan :

- Proses
- Validasi & Koreksi

13

INDIKATOR KINERJA :

Persentase Unit Kerja BRPBAP-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	
1	Nama Indikator	:	0ðÞhðāīéĥð 5āø +ðÞłé " 20" ! 0 ⓪0 Ĺéāó - ðāðÞłéēúéā - éāéùðþ ðā 0ðāóðīé÷ı éā Ĺéāó 4ðÞĥīéāí éÞłĹźĹ∠	
2	Definisi	:	• Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.	
3	Formul Perhitungan	:	Sistem Manajemen Pengetahuan terstandar yang diimplementasikan di Level Pusat Lingkup BPPSDM Tahun 2024 diantaranya ; ● Menggunakan Aplikasi (*collaboration office*) dengan alamat **portal.kkp.go.id**; ● Pengukuran level 2 dihitung dengan lingkup Level Pusat Lingkup BPPSDM **(Sekretaris/Kepala Pusat/balai & Ketua Tim Kerja)** ● Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap satu triwulan dengan nilai 3 poin. ● Bobot Komponen Keaktifan diantaranya ; ○ Konten dokumentasi **tulisan kegiatan** rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan **poin 0,5**; ○ Konten berupa karya **infografis poin 1**; ○ Konten berup **jurnal/video**/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan **poin 3;**	Cara Mengukur : ***Keaktifan :*** $\frac{\textbf{Jumlah Poin Pejabat yang Aktif}}{\textbf{Jumlah Target Poin Pejabat yang Aktif}}$ ***x 100%*** $MP_{Unit\ Level\ 2}$ ***= Nilai capaian Keaktifan / Nilai Target * 100%*** • $MP_{TW}I$ **= Nilai TW I** • $MP_{TW}II$ **= (Nilai TW I + Nilai TW II) / 2** • $MP_{TW}III$ **= (Nilai TW I + Nilai TW II + Nilai TW III) / 3** • $MP_{Unit\ Level\ 2\ tahun}\ 2024$ **= (Nilai TW I + Nilai TW II + Nilai TW III + Nilai TW IV) / 4**

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	**(X) Output kendali tinggi**	(X) Output kendali rendah	( ) Outcome	
6	Sumber Data	:	Sekretariat BRSDM (PUSDATIN)			
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**	
8	Polarisasi	:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	**(X) Triwulanan**	( ) Semesteran	( ) Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Surat Capaian IKU MP dari BRSDM KP			

Persentase Unit Kerja BRPBAP-PP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

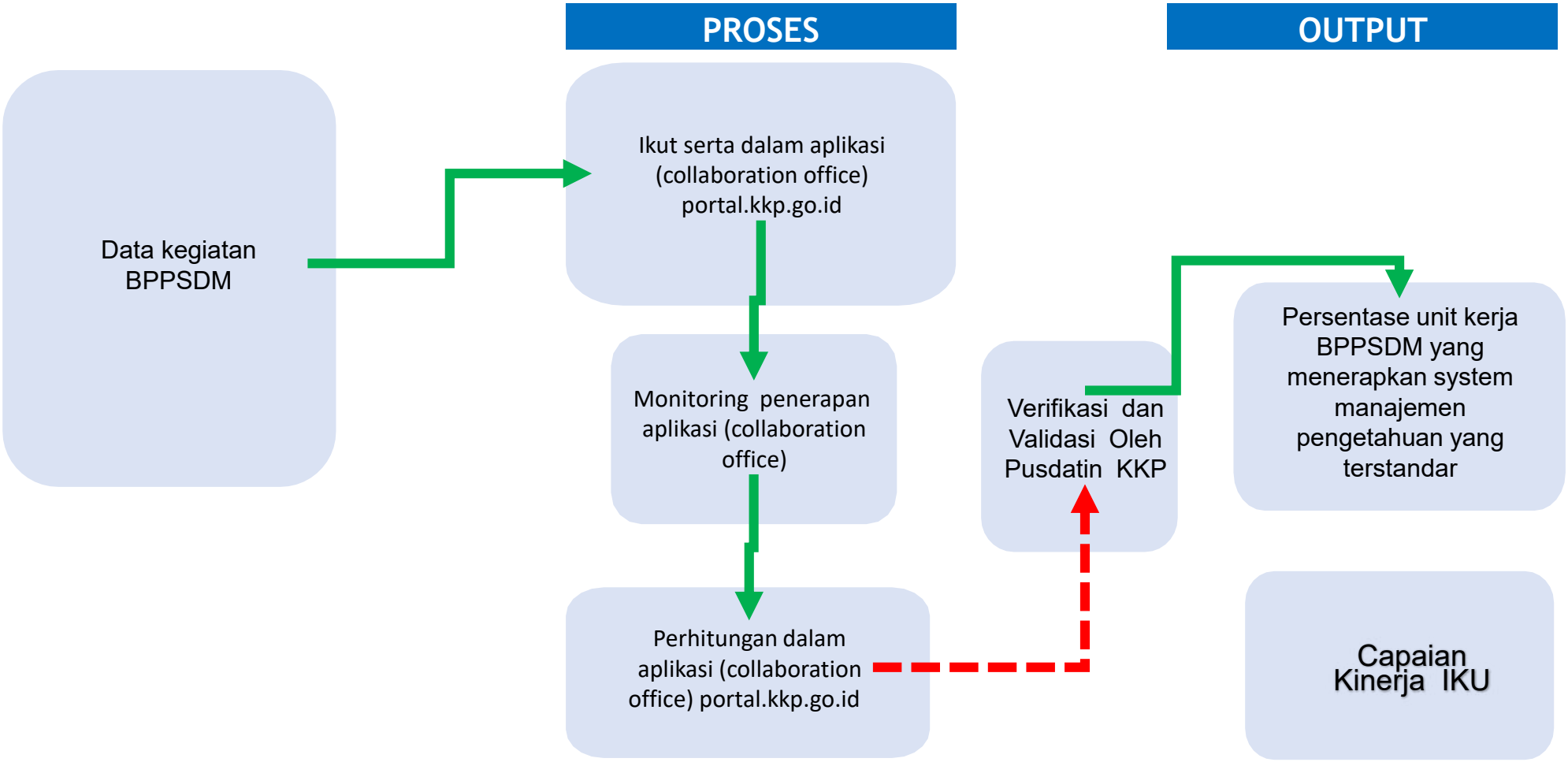

Keterangan :

- Proses
- Validasi & Koreksi

14

INDIKATOR KINERJA :

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPBAP-PP (%)

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
1	Nama Indikator	:	0ðĦðāīéħð 2ðúđþ ðāí éħø÷éħøüēðāóéij éħéā L·éāó í ǿ p éāòéīúéā ı āīı ú ēðĦêéøúéā úøāðĦúé " 20" ! 0 1̲00 L̄ZL∠			
2	Definisi	:	Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh unit Eselon II lingkup BRSDM.			
3	Formula Perhitungan	:	$\frac{\textit{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklnjuti}}{\textit{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Eselon II}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	**(X) Output kendali tinggi**	(X) Output kendali rendah	( ) Outcome	
6	Sumber Data	:	Sekretariat BRSDM			
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**	
8	Polarisasi	:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	**(X) Triwulanan**	( ) Semesteran	( ) Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Surat Capaian IKU Persentase jumlah rekomendasi dari BRSDM KP			

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRPBAP-PP (%)

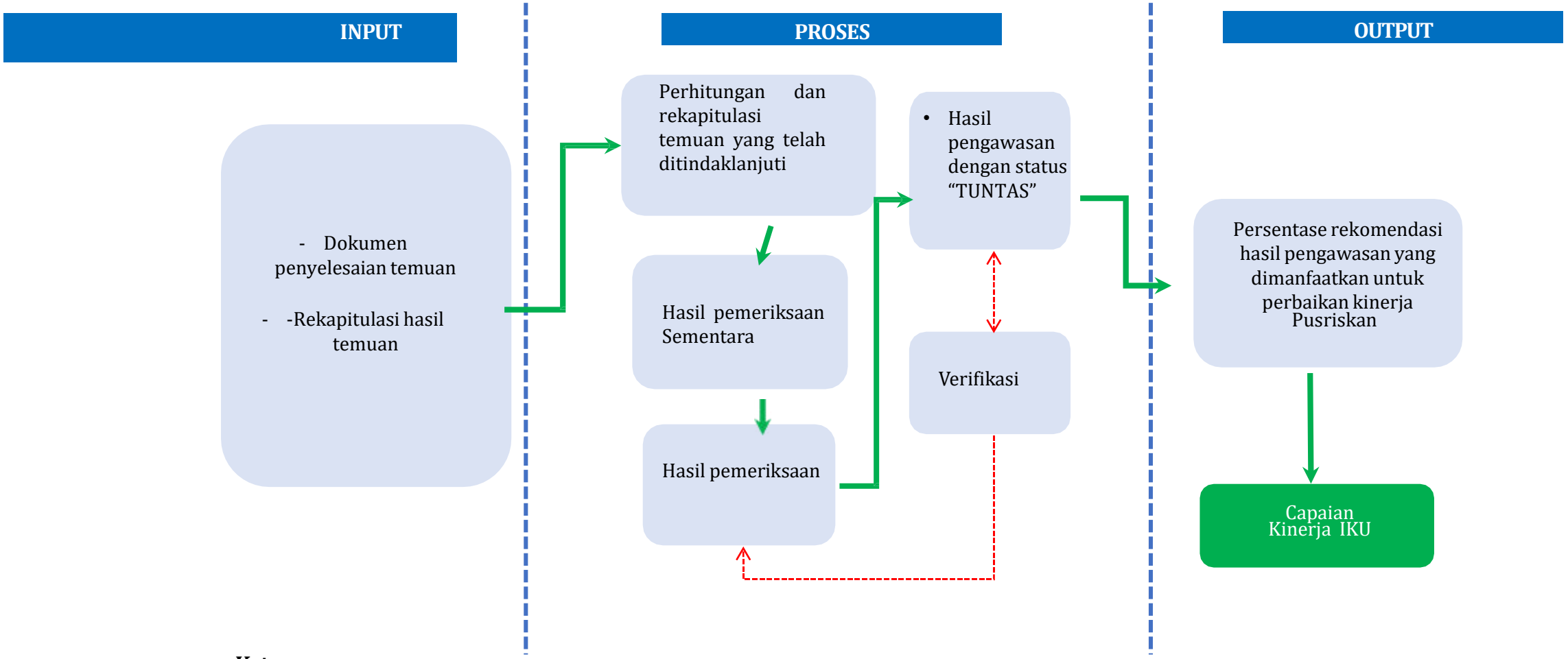

Keterangan :

Proses

Validasi & Koreksi

15

INDIKATOR KINERJA :

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAP-PP (Nilai)

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker
1	Nama Indikator	:	)āí øúéīđĦ+øāðĦté 0ðüéúħéāééā ! āóóéĦéā " 20" ! 0 100 L øüéø∠
2	Definisi	:	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. **Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran** dibagi menjadi 4 (empat), antara lain (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; (b) Baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA > 95; (c) Cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA >70
3	Formula Perhitungan	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) • Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. Nilai IKPA = $\sum_{n=1}^{8} (\boldsymbol{Nilai\ Indikator}_{\boldsymbol{n}}\ \boldsymbol{x\ Bobor\ Indikator}_{\boldsymbol{n}}) : \boldsymbol{Konversi\ Bobot}$ **1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%** • Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif) • Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan • Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik IKPA Rev = $IKPA\ Rev = \frac{\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{RRev\ n}}{n}$ **2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%** • Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan • Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari • Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik Belanja Pegawai : DevDIPA BPeg = $\frac{\|R\ BPeg\ n - RPD\ BPeg\ n\|}{RPD\ B\ Peg\ n} x100$ Belanja Barang : DevDIPA Bbar = $\frac{\|R\ BBar\ n - RPD\ BBar\ n\|}{RPD\ B\ Bar\ n} x100$ Belanja Modal : DevDIPA BMod = $\frac{\|R\ BMod\ n - RPD\ BMod\ n\|}{RPD\ B\ Mod\ n} x100$ Seluruh Jenis Belanja : DevDIPA n= $\frac{\|Dev\ DIPA\ BPeg + DevDIPA\ BBar + Dev\ DIPA\ BMod\|}{3}$

KODE IK SASARAN	IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

3. **Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%**

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu\ BPeg\ x\ Target\ BPeg\ Tw\ ke\ -n$$
$$TPBelBar_n = Pagu\ BBar\ x\ Target\ BBar\ Tw\ ke\ -n$$
$$TPBelMod_n = Pagu\ BMod\ x\ Target\ BMod\ Tw\ ke\ -n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PAn)}{(TPn)}\ x\ 100$$

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatangan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$\text{KPA BK} = (NK\ - Kw\ * 40\%) + (NK\ Dini\ * 30\%) + (NK\ BM\ * 30\%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontakrual non belanja pegawai
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontaktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS}\right) x\ 100$$

KODE IK SASARAN	IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^{n} KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.
- %GUP disebulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^{n} PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikekola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran\ TUP}{TUP} x\ 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

*IKPAUPTUP = (NK – UPKW * 50%) + (NK – PGUP * 25%) + (NKSetor * 25%)*

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,

Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- Rasio Dispensasi (permil) RDSPM = $\left(\frac{SPM\ Dispensasi}{SPM\ Tw\ UV}\right) x\ 1000$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK\ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^{n} ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA

- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\frac{\sum_{i=1}^{n} Capaian\ RO}{Target\ RO}}{n}\right)$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW\ x\ 30\%) + (NKCRO\ x\ 70\%)$$

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
4	Satuan	:	Nilai			
5	Tingkat Validitas IK	:	( ) Output kendali tinggi	**(X) Output kendali rendah**	( ) Outcome	
6	Sumber Data	:	Biro Keuangan			
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**	
8	Polarisasi	:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	**(X) Semesteran**	( ) Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Surat Capaian Nilai IKU IKPA dari Biro Keuangan			

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAP-PP (Nilai)

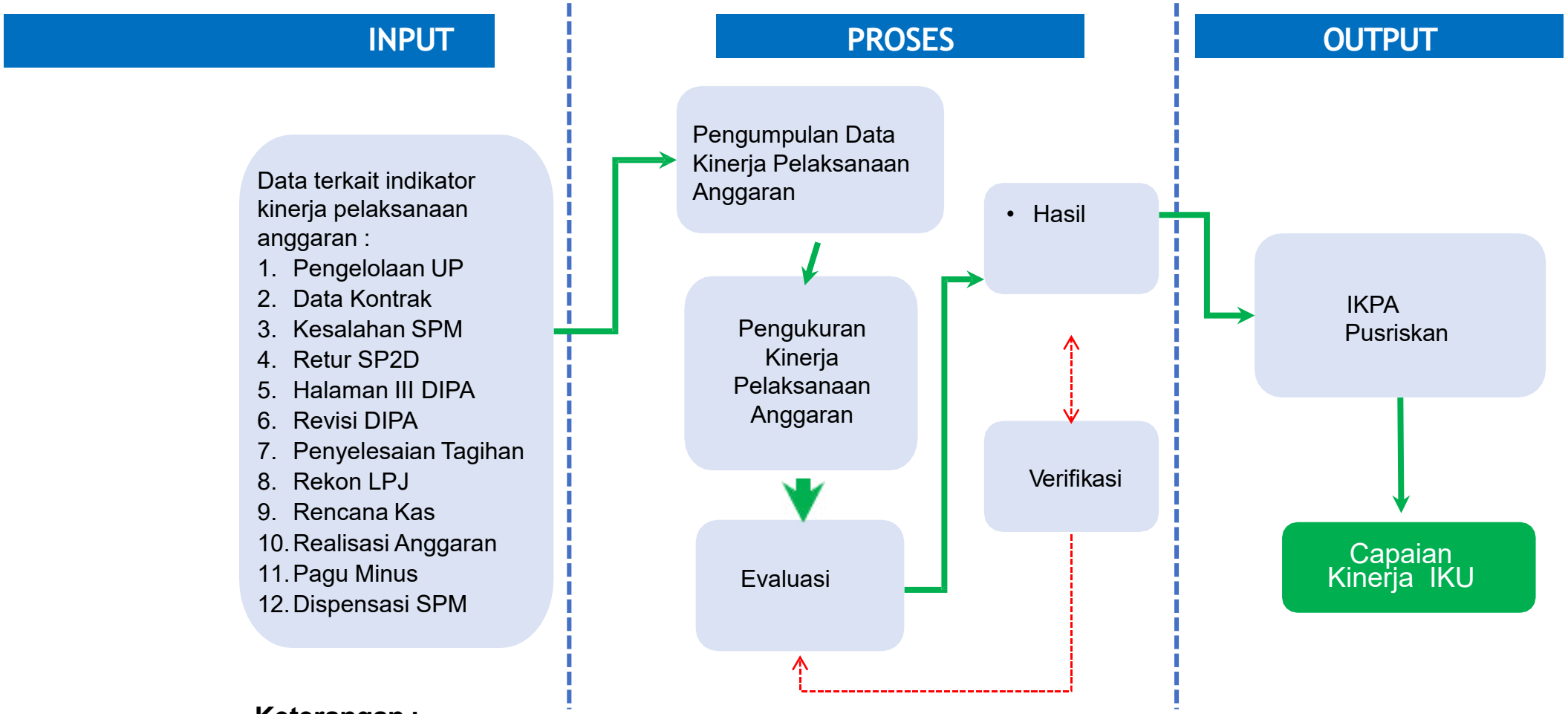

Keterangan :

→ Proses

⇢ Validasi & Koreksi

16

INDIKATOR KINERJA :

Nilai Kinerja Anggaran BRPBAP-PP (Nilai)

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker		
1	Nama Indikator	:	. øéø+øāðĦé ! āóóéĦéā " 20" ! 0 100 L øéø∠		
2	Definisi	:	• Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. • Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenm penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya • Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terj adi dalam Pemangku Kepen ting an se bagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kernen terian / Lembaga • Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah • Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain : (a) Sangat Baik, apabila NKA > 90; (b) Baik, apabila NKA >80 - 90; (c)Cukup, apabila NKA >60 - 80; (d) Kurang, apabila NKA >50 – 60; (e) Sangat Kurang, apabila ≤ 50		
3	Formula Perhitungan	:	***Formula Aspek Implementasi*** $$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$ Keterangan : NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi P : penyerapan anggaran K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan COP : capaian output program CRO : capaian ro NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja W_P : bobot penyerapan anggaran W_K : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan W_{COP} : bobot capaian Output Program W_{CRO} : bobot capaian RO	***Formulasi Aspek Manfaat*** $$NKA\ K/L = \frac{CSS + \text{ rata} - \text{rata nilai kinerja anggaran tingkat unit esselon I}}{2}$$ Keterangan : NKA K/L : nilai kinerja anggaran tingkat kementerian/ lembaga CSS : capaian sasaran strategis/ nilai kinerja kementrian/ lembaga atas aspek manfaat W_E : bobot efisiensi Bobot masing masing variabel aspek implementasi sebagai berikut : W_P = 9,7% W_K = 18,2% W_{COP} = W_{CRO} = 43,5 % W_E = 28,6%	
4	Satuan	:	Nilai		
5	Tingkat Validitas IK	:	( ) Output kendali tinggi	**(X) Output kendali rendah**	( ) Outcome

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
6	Sumber Data	:	Biro Keuangan (Aplikasi SMART DJA KEMENKEU)			
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**	
8	Polarisasi	:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	**(X) Tahunan**
10	Bukti Dukung	:	Nota Dinas dari Biro Keuangan / Capture Aplikasi SMART DJA KEMENKEU			

Nilai Kinerja Anggaran BRPBAP-PP (Nilai)

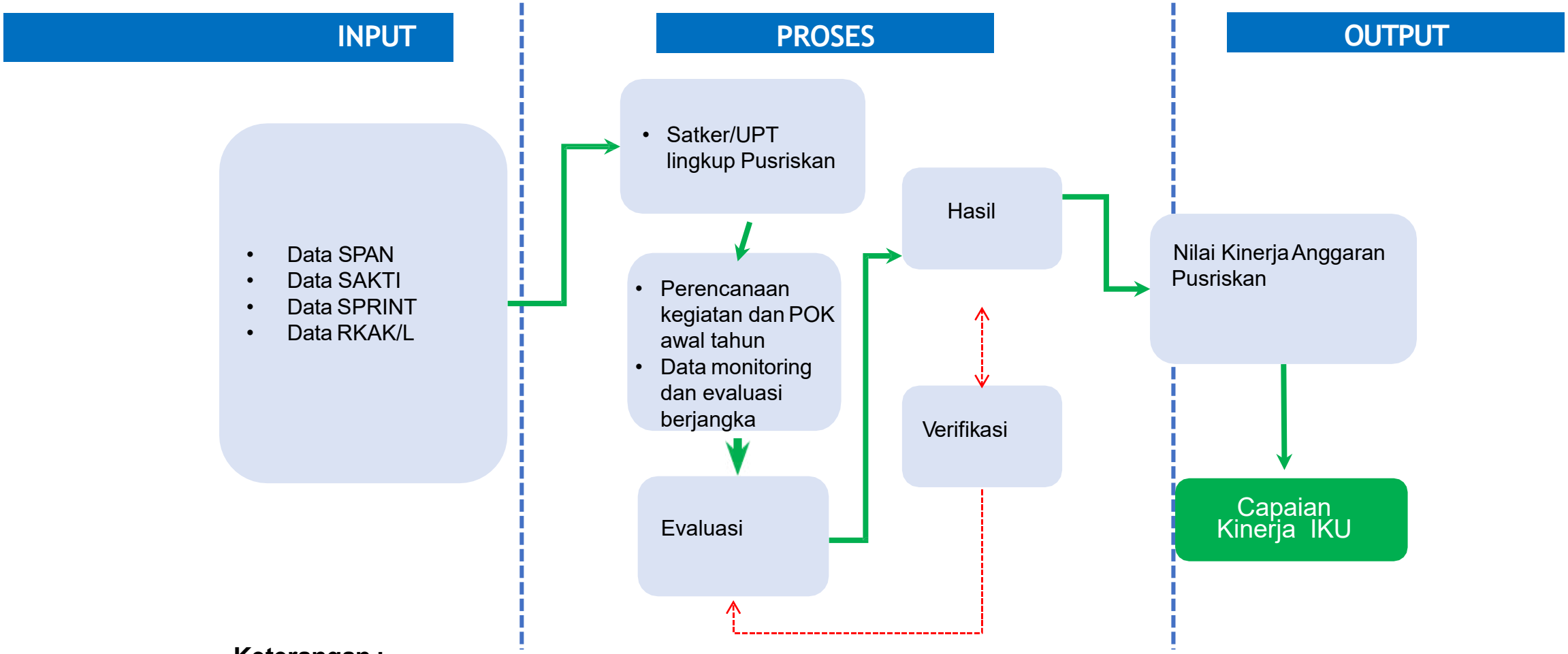

Keterangan :

- Proses
- Validasi & Koreksi

17

INDIKATOR KINERJA :

Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPBAP-PP (Kemitraan)

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
1	Nama Indikator	:	+ðþ øÞÉéā Ĺéāó í øðēéúéīøí éā €éīéı í øøāí éúüéāù īø" 20" ! 0 100 ⊥±ðþ øÞÉéā ∠			
2	Definisi	:	Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara Satuan Kerja lingkup Pusat Riset Perikanan dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN Satuan Kerja lingkup Pusat Riset Perikanan. Dasar Hukum: a. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP b. PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN c. Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Perjanjian			
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah kemitraan yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan			
4	Satuan	:	Kemitraan			
5	Tingkat Validitas IK	:	( ) Output kendali tinggi	**(X) Output kendali rendah**	( ) Outcome	
6	Sumber Data	:	Satker lingkup Pusat Riset Perikanan			
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**	
8	Polarisasi	:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	( ) Triwulanan	( ) Semesteran	**(X) Tahunan**
10	Bukti Dukung	:	1. Naskah Perjanjian Kemitraan yang disepakati kedua belah pihak diantaranya: Perjanjian Sewa Menyewa , Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (BMN), Perjanjian Bangun Guna Serah, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Perjanjian Kerjasama di bidang pengembangan SDM KP, dll 2. Laporan Kegiatan Kemitraan			

Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPBAP-PP (Kemitraan)

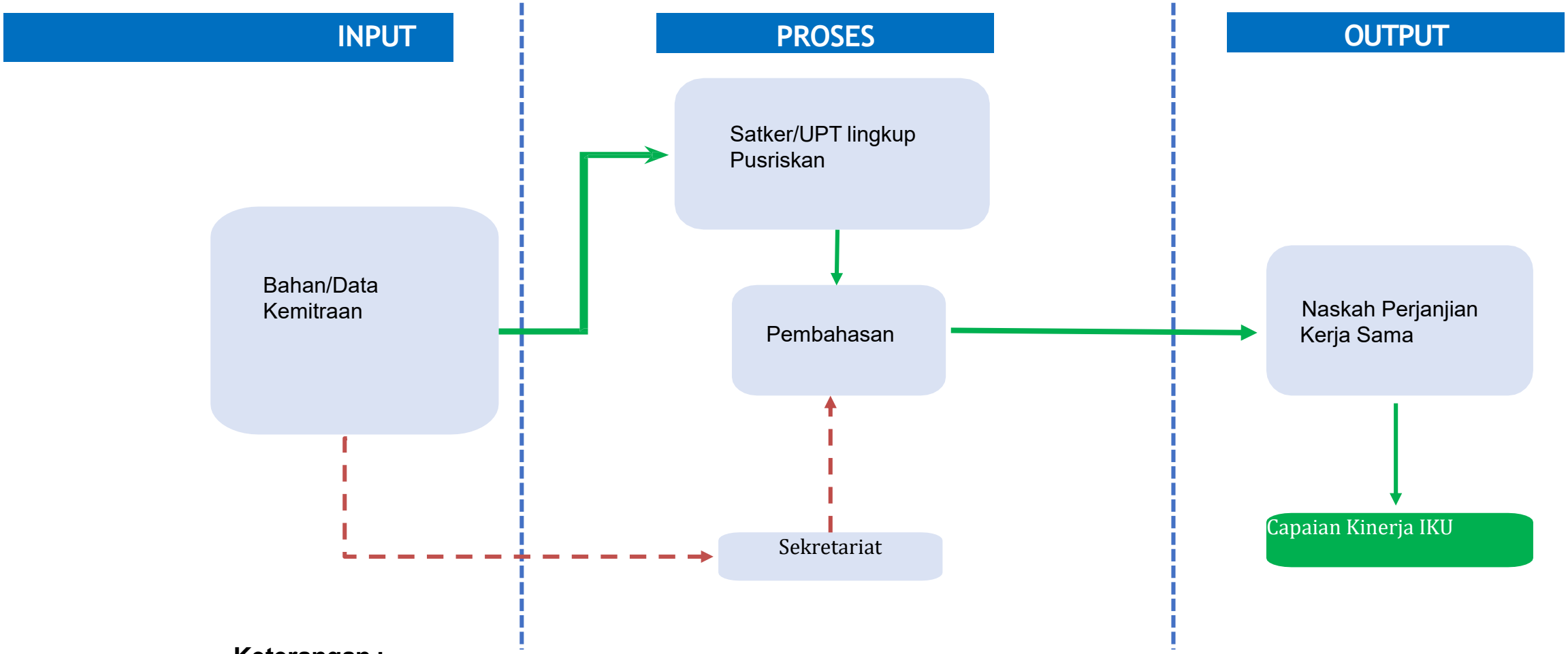

Keterangan :

- Proses
- Validasi & Koreksi

18

INDIKATOR KINERJA :

Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBAP-PP (%)

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker		
1	Nama Indikator	:	0ðÞhðāīéÞðíı úı āóéā þ éāéùðþ ðā īðúāðní éā úðóæéīéā ħīÞÞéīðóðnüéāāĿé "20"! 0 100 LZ∠		
2	Definisi	:	Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Riset Perikanan berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan. Dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll.		
3	Formula Perhitungan	:	A. Jumlah target dokumen hasil dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya (buah) adalah jumlah dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah realisasi dokumen hasil dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya (buah) adalah jumlah dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya pada tahun berjalan. C. Dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. $Persentase\ Dukungan\ Manajemen\ Teknis\ dan\ Kegiatan\ Strategis\ Lainnya = \frac{Jumlah\ realisasi\ dokumen}{jumlah\ target\ dokumen} \times 100\%$ Persentase dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya yang tersedia / dibandingkan total dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya yang ditargetkan		
4	Satuan	:	%		
5	Tingkat Validitas IK	:	**(X) Output kendali tinggi**	( ) Output kendali rendah	( ) Outcome
6	Sumber Data	:	Pusat Riset Perikanan (Tata Usaha, Program dan Anggaran, Tata Laksana dan Data, Monev dan Pelaporan, Kerja Sama dan Diseminasi)		
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker			
8	Polarisasi	:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	**(X) Triwulanan**	( ) Semesteran	( ) Tahunan
10	Bukti Dukung	:	Dokumen Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya yang tersedia dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi			

√√

Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBAP-PP (%)

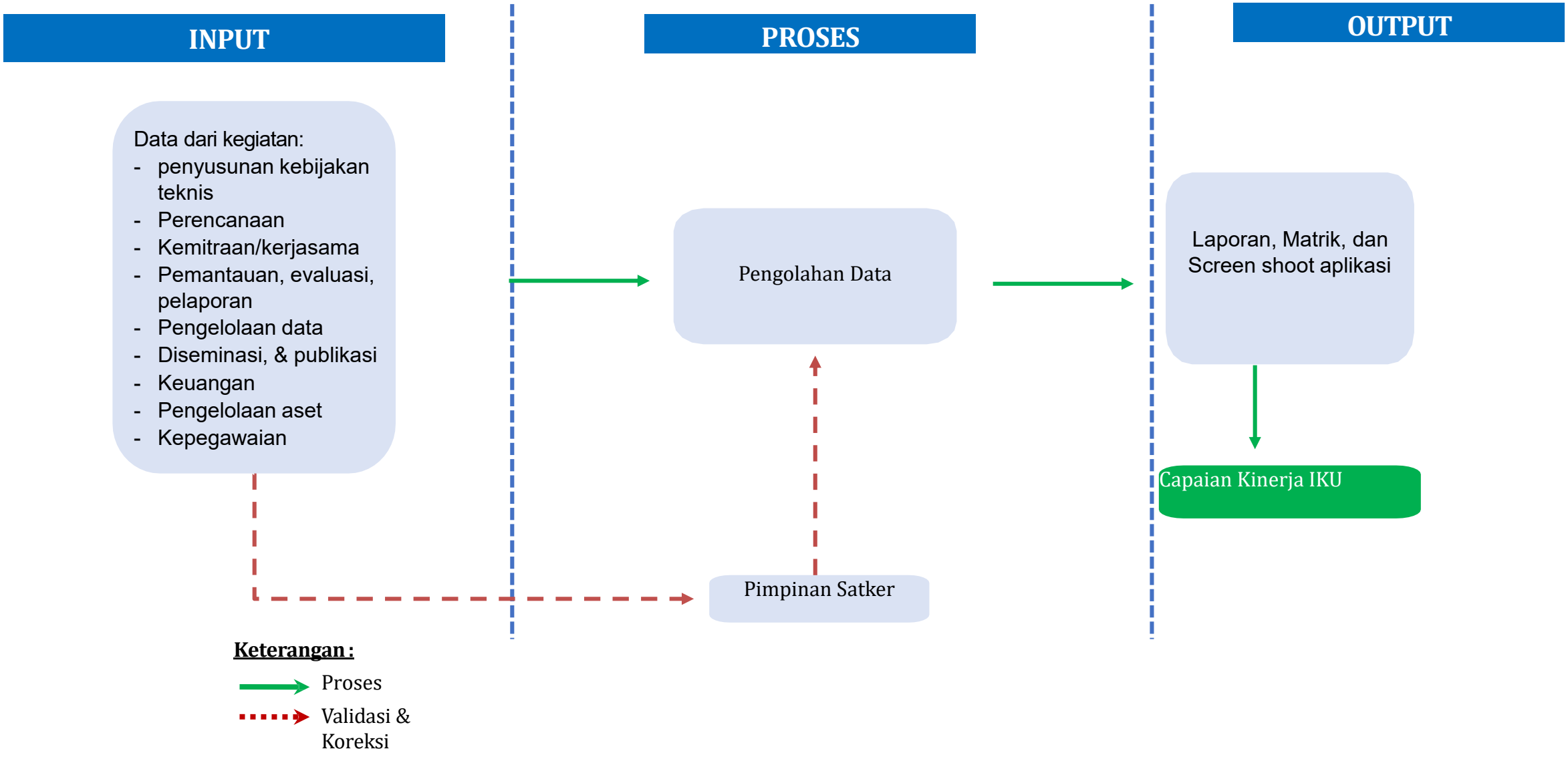

19

Indikator Kinerja :

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Penyuluhan KP BRPBAP-PP (%)

KODE IK SASARAN			IK MANDATORY Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker				
1	Nama Indikator	:	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Penyuluhan KP BRPBAP-PP (%)				
2	Definisi	:	Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran				
3	Formula Perhitungan	:	✓ A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. ✓ B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan. ✓ Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. $Persentase\ Layanan\ Dukungan\ Manajemen\ Internal = \frac{Jumlah\ realisasi\ dokumen\ hasil\ layanan}{jumlah\ target\ dokumen\ hasil\ layanan} x\ 100\%$				
4	Satuan	:	Dokumen				
5	Tingkat Validitas IK	:	**(X) Output kendali tinggi**	( ) Output kendali rendah	( ) Outcome		
6	Sumber Data	:	Puslatluh KP				
7	Pola Perhitungan	:	( ) Akumulasi	( ) Rata-Rata	**(X) Nilai Posisi Akhir**		
8	Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung	( ) Lingkup Dipersempit	( ) Komponen Pembentuk	**(X) Buat Baru**	( ) Tidak diturunkan
9	Polarisasi	:	**(X) Maximize**	( ) Minimize	( ) Stabilize		
10	Periode Pelaporan	:	( ) Bulanan	**(X) Triwulanan**	( ) Semesteran	( ) Tahunan	
11	Bukti Dukung	:	1. Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani pimpinan satker 2. Dokumen Layanan Manajemen di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP sebanyak 100 Dokumen.				

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Penyuluhan KP BRPBAP-PP (%)

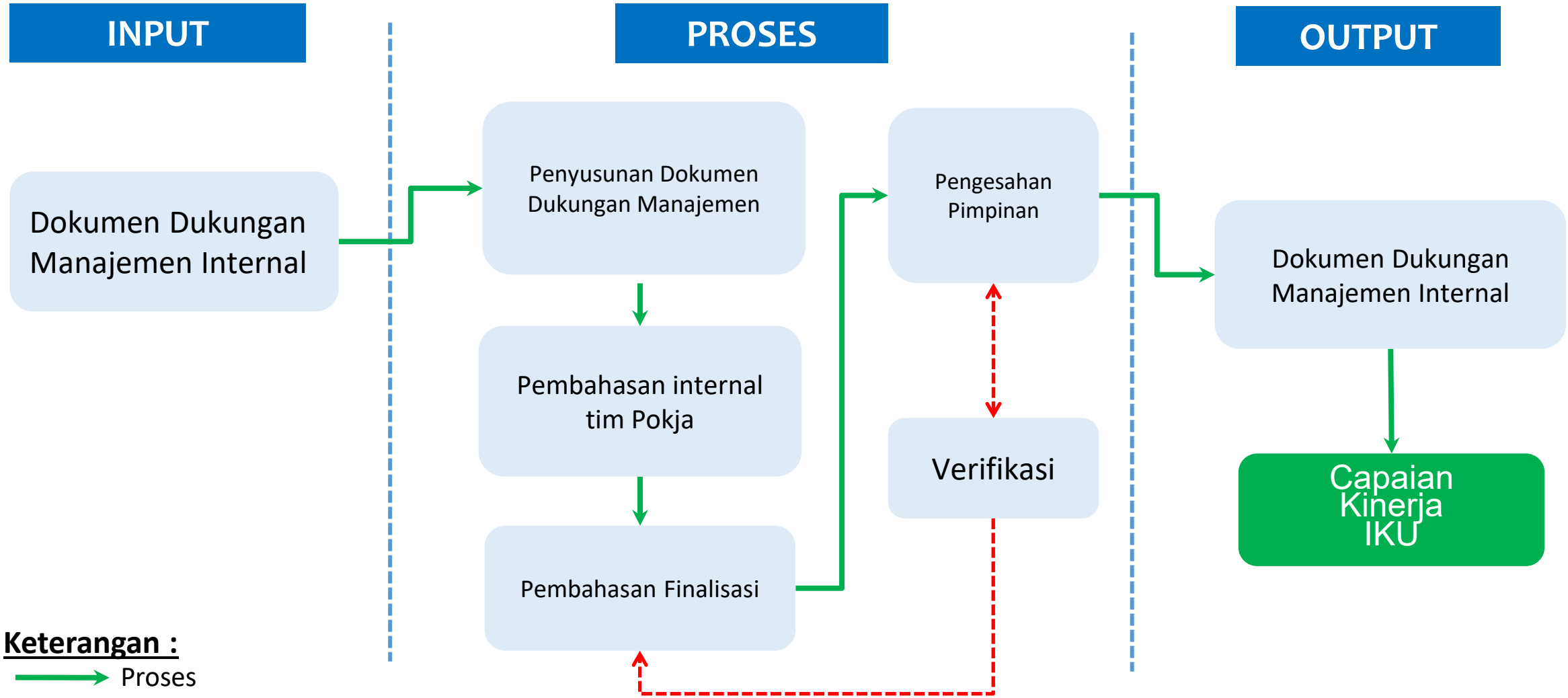

Keterangan :

→ Proses

⇢ Validasi & Koreksi